

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS PERDAGANGAN



DINAS PERDAGANGAN

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS PERDAGANGAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-V pelaksanaan Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS PERDAGANGAN. Kinerja DINAS PERDAGANGAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS PERDAGANGAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung

kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 18 Januari 2024
**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**

ACHMAD SIDDIK, S.A.P., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700205 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	36
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS PERDAGANGAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS PERDAGANGAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perdagangan.

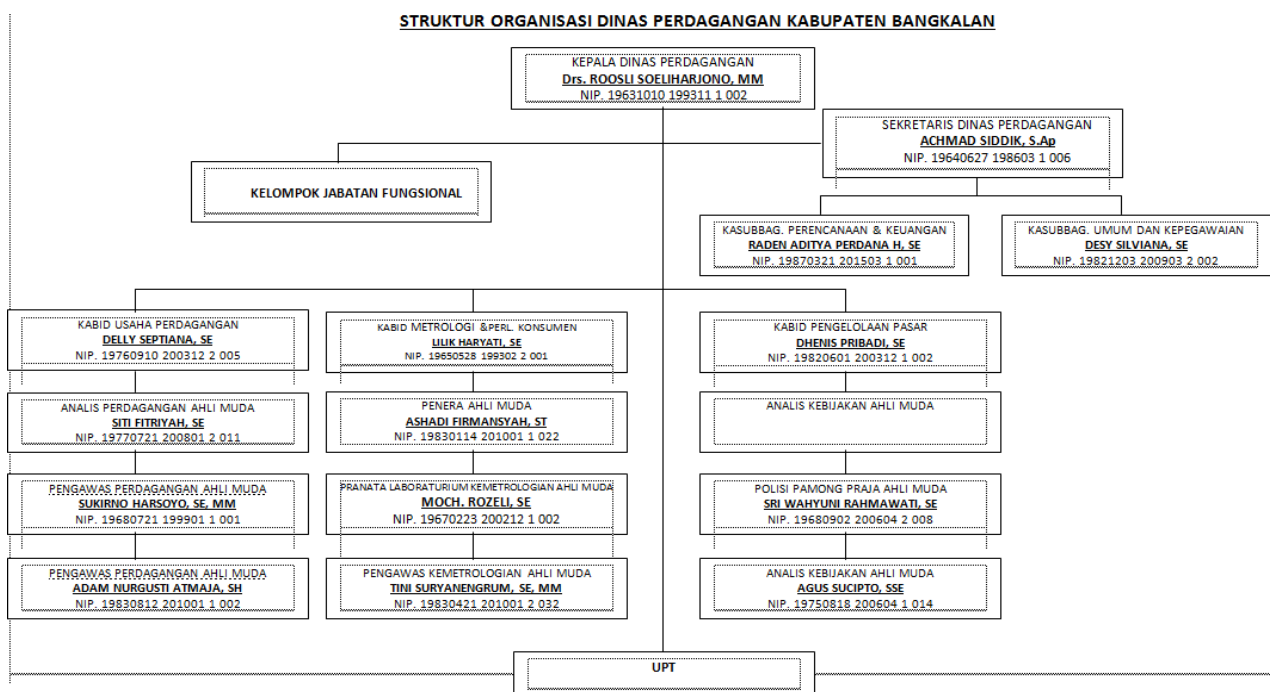
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai

B. pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/SubBidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan.

Gambar 1.1.



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila

dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya produk unggulan untuk mengembangkan peran duniausaha dan investasi
3. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
5. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameran-pameran lainnya
6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
9. Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar.
11. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala Pasar.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan.

2. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
3. Peningkatan informasi perdagangan
4. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
5. Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
6. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala Pasar.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 47/E);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS PERDAGANGAN . Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS PERDAGANGAN tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DINAS PERDAGANGAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS PERDAGANGAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS PERDAGANGAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS PERDAGANGAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS

PERDAGANGAN dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG
RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL**

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Bangkalan sebagaimana dikemukakan diatas, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mengemban Misi ke 3 yaitu :

“Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas Dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak dua tujuan dan dua sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS PERDAGANGAN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR KINERJA	TARGET KINERJA PADATAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATKAN LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Laya kFungsi	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATKAN LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SK MTerhadap Layanan Pasar	80	80	81	82	83

Sumber : Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS PERDAGANGAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	2.1	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	prosentase	Mengukur jumlah infrastruktur pasar rakyat yang diperbaiki dalam satu tahun anggaran	Jumlah Infrastruktur Pasar Rakyat Yang Diperbaiki : Jumlah Seluruh Infrastruktur Pasar Rakyat x 100%	DISDAG
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	2.2	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	nilai	Mengukur nilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pasar	e-Sukma
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	1.1	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	indeks	Mengukur terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Rata-rata dari semua kegiatan kesekretariatan	DISDAG

2	Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan	2.1	Persentase ketercapaian kinerja program urusan Bidang Perdagangan	prosentase	Mengukur tercapainya kinerja program urusan bidang perdagangan	Rata-rata dari semua kegiatan pada Urusan Bidang Perdagangan	DISDAG
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	1.1	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	prosentase	Mengukur pertumbuhan PDR Bkategori perdagangan	-	Statistik

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
DINAS PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATKAN LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	prosentase	6.9
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATKAN LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	nilai	84
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang	2.1 TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIA	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	indeks	100

	perdagangan		TAN			
--	-------------	--	-----	--	--	--

Sumber : Rencana Kerja DINAS PERDAGANGAN tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada bulan November tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS PERDAGANGAN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	84
3	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100

4	Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusab Bidang Perdagangan	100
5	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	5.2

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS PERDAGANGAN:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Pasar yang Dibangun	10.34
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Operasi Penertiban & Pelaksanaan Pemutahiran Data Pedagang Di Pasar Yang Dilaksanakan	100 %
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen yang Dilaksanakan	100 %
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Persentase Pengendalian Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di	100 %

	Kabupaten/Kota	Tingkat Pasar Kabupaten Atau Kota	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Alat UTTP Dalam Rangka Perlindungan Konsumen	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 %
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %

	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100 %
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100 %
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN	100 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA LAYANAN KESEKRETARIATAN	100 %
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN PASAR	6.9 %
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKSPOR YANG DILAKSANAKAN	100 %
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	2 Unit
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana	jumlah fasilitasi pengelolaan sarana	29 Unit

	Distribusi Perdagangan	distribusi perdagangan	
1	Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	1 Laporan
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1 Laporan
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) kabupaten/kota	1 Laporan
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten atau kota	1 Laporan
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha	jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan	20 Pelaku Usaha

	Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	yang dibina	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	250 Unit
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Laporan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	9 Laporan

		yang disediakan	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	1 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERDAGANGAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERDAGANGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS PERDAGANGAN .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS PERDAGANGAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS PERDAGANGAN juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS PERDAGANGAN tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	Sangat Tinggi	Disdag
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	100	Sangat Tinggi	Disdag
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	84	89,82	100	Sangat Tinggi	e-sukma

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian

2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	100
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	80	81	88,25	89,82	84	106,93
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusan Bidang Perdagangan	100	100	100	100	100	100
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	6,81	-7,93	3.15	5.2	5.2	100

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan yaitu :

1. Pada sasaran strategis meningkatnya layanan daya saing sektor perdagangan menunjukkan pencapaian
 - indikator persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi capaian di tahun 2023 tercapai dengan baik yaitu tercapai 100% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 2 pasar yang diperbaiki untuk tahun 2023 dari total 29 pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan
 - untuk indikator nilai SKM terhadap layanan pasar juga tercapai dengan baik yaitu mempunyai nilai 89,82 dari target nilai 83 hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan mendapat apresiasi yang bagus dari masyarakat, dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mempunyai nilai 88,25
2. Pada sasaran Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan menunjukkan pencapaian
 - Indikator Persentase ketercapaian kinerja program urusan Bidang Perdagangan yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	100
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	89,82	84	106,93
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusab Bidang Perdagangan	100	100	100
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	5.2	5.2	100

Sebagaimana pada tabel 3.4, maka rata-rata tingkat kemajuan pencapaian indikator sasaran pada tahun 2022 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2023) adalah 101%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9		100
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	89,82		106,93
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100		100
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusab Bidang Perdagangan	100		100
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	5.2		100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak	6.9	6.9	100	Berhasil	

	PERDAGANGAN	Fungsi					
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	84	89,82	106,93	Berhasil	
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	Berhasil	
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusab Bidang Perdagangan	100	100	100	Berhasil	
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	5.2	5.2	100	Berhasil	

Dari tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa setiap Sasaran Dinas Perdagangan pada tahun 2023 berhasil dilaksanakan dengan baik dan tercapai semua target yang sudah ditetapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6,9	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Pasar yang Dibangun	99	Menunjang

				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Operasi Penertiban & Pelaksanaan Pemutahiran Data Pedagang Di Pasar Yang Dilaksanakan	100	Menunjang
1		Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	84	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluhan Dan Pemberdayaan Konsumen	100	Menunjang
2				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten Atau Kota	100	Menunjang
1				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Alat UTTP Dalam Rangka Perlindungan Konsumen	100	Menunjang
1				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Ekspor yang Dilaksanakan	100	Menunjang
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100	Menunjang

					Daerah		
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	99	Menunjang
3				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Menunjang
4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99	Menunjang
5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	96	Menunjang
7				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Menunjang
1				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	100	Menunjang

				PENTING	PENTING		
2				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN	100	Menunjang
3				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA LAYANAN KESEKRETARIATAN	99	Menunjang
4				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN PASAR	6.8	Menunjang
5				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKSPOR YANG DILAKSANAKAN	100	Menunjang
1				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	100	Menunjang
2				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	Menunjang
1				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	100	Menunjang
1				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan	100	Menunjang

				Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat		
1				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	100	Menunjang
2				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	100	Menunjang
3				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	100	Menunjang
1				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	100	Menunjang
1				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	100	Menunjang

1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Menunjang
2				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	100	Menunjang
3				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang
4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100	Menunjang
1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100	Menunjang
1				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Tersusun	100	Menunjang

1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	Menunjang
2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	Menunjang
3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100	Menunjang
4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	Menunjang
5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	Menunjang
6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	100	Menunjang
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Menunjang
1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	Menunjang
2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100	Menunjang

1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	Menunjang
2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	Menunjang

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa setiap Program, Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan menunjang kinerja Dinas Perdagangan padatahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.044.164.400	1.029.275.649	98.57
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	7.480.950	7.480.950	100
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	29.524.250	29.524.250	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.100.000	4.100.000	100

1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.433.250	1.433.250	100
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	19.952.100	19.952.100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.858.148.391	19.613.616.656	98.77
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	166.160.750	166.160.750	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.205.874	53.902.074	99.44
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.111.923.565	12.074.223.050	99.69
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.549.800	66.794.100	96.04
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.250.000	1.250.000	100
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.045.597.650	1.030.708.899	98.58
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.265.338.380	31.980.046.630	99.12
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	27.433.050	27.433.050	100
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	29.524.250	29.524.250	100

5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	10.000.000	10.000.000	100
---	-----------------------------	------------	------------	-----

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	6.9	6.9	100	1.112.554.950	1.097.666.099	98.66	1.34 %
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	84	89,82	106,93	1.112.554.950	1.097.666.099	98.66	1.34 %
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	100	100	100	32.265.338.380	31.980.046.630	99.12	0.88 %
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	100	100	100	32.265.338.380	31.980.046.630	99.12	0.88 %
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	5.2	5.2	100	1.112.554.950	1.097.666.099	98.66	1.34 %

Dari tabel 3.9 dapat dijelaskan untuk Sasaran Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan sebesar Rp 1.112.554.950,- dengan realisasi sebesar Rp 1.097.666.099,- dengan semua program kegiatan terlaksana semua Dinas Perdagangan dapat mengefisiensi anggaran sebesar 1.34 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PERDAGANGAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 DINAS PERDAGANGAN menetapkan sebanyak dua tujuan, dua sasaran dengan tiga indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Produktifitas Perdagangan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Tujuan Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor

Perdagangan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

- Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.377.893.330,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp33.077.712.729,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 99% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERDAGANGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERDAGANGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 18 Januari 2024
**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**

ACHMAD SIDDIK, S.A.P., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700205 200312 1 004